

Sertifikasi CPO, negara maju kutip US\$ 3 per ton...

PABRIK CPO

INI NAMANYA 'UANG JAGO'

YA WAJAR CPO BIKIN IRI NEGARA MAJU...



## Harga Minyak dan Prioritas Anggaran

► Kenaikan harga minyak mencapai US\$ 100 per barel tinggal menunggu momentum. Kalau hal itu terjadi, bukan tidak mungkin akan mengerek ke harga lebih tinggi mengingat unsur psikologis yang menyertainya.



Oleh Hidayat Amir

Menyikapi perubahan harga minyak dunia seperti ini, kembali elite politik kita, baik pemerintah (eksekutif) maupun DPR (legislatif) memperlihatkan sikap mendua. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2007, asumsi harga minyak ditetapkan US\$ 63 per barel, sedangkan *lifting* minyak dipatok 2 juta barel per hari (bph). Namun, pemerintah dan DPR kemudian merevisinya dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2007 masing-masing menjadi US\$ 60 per barel dan 950 ribu bph. Sekarang harga minyak membung dan bahkan realisasi *lifting* minyak kini hanya 910 ribu bph.

Kondisi ini mengingatkan kita pada polemik krisis harga minyak pada tahun 2005 yang akhirnya mendorong pemerintah mengambil kebijakan menyesuaikan harga bahan

bakar minyak (BBM). Saat itu harga minyak dunia bergerak dari kisaran harga US\$ 30 per barel pada akhir tahun 2004 menuju level US\$ 60 pada akhir tahun 2005. Untuk mengamankan anggaran, pemerintah memandang perlu menaikkan harga BBM.

Melalui tarik ulur yang cukup alot antara eksekutif dan legislatif, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan menaikkan harga BBM dalam momentum yang tidak tepat, sehingga berdampak pada kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar.

Kini gejolak harga minyak dunia kembali meradang. Sudahkah kebijakan pemerintah dua tahun silam berimbas pada tujuan yang diharapkan? Apakah kebijakan tersebut masih relevan kini? Tulisan ini mencoba mengingatkan kembali akan masalah pelik tersebut.

### Distorsi Subsidi

Sudah jamak dimaklumi bahwa subsidi terhadap harga BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu daripada kelompok masyarakat kurang mampu. Pihak yang semakin banyak mengonsumsi BBM itulah sesungguhnya yang semakin banyak menikmati subsidi. Selain itu, harga BBM yang relatif murah secara tidak langsung memberikan insentif kepada masyarakat untuk mengonsumsi lebih banyak dan

cenderung boros. Hal ini yang mendorong terjadinya kemacetan luar biasa di berbagai kota besar, utamanya di Jakarta.

Idealnya, harga BBM bersubsidi yang kini sudah mulai mendekati harga ekonominya dilepas saja ke harga pasar. Pertamina, solar untuk industri dan premium untuk industri sudah menyesuaikan harga pasar. Sudah saatnya harga premium nonindustri dilepas pada harga pasar juga.

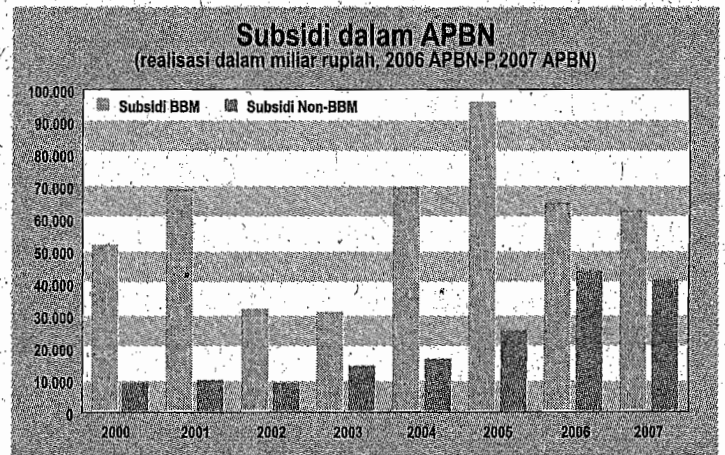
Setidaknya ada dua alasan yang mendukung ide ini. *Pertama*, untuk menjaga konsistensi kebijakan pemerintah dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan distorsi subsidi. Kebijakan subsidi yang tidak tepat hanya akan menimbulkan

**Harga BBM yang relatif murah secara tidak langsung memberikan insentif kepada masyarakat untuk mengonsumsi lebih banyak dan cenderung boros.**

masalah ketidakadilan dalam masyarakat. *Kedua*, memberikan insentif untuk penghematan BBM dan konversi ke sumber energi yang lain.

Apakah menaikkan harga premium tidak akan berdampak terhadap inflasi? Tentu saja berdampak, namun karena dilakukan secara gradual dan mempertimbangkan momentum yang tepat maka dampak negatifnya tidak terlalu menyakitkan. Bayangkan kalau menunggu kondisi seperti tahun 2005, maka akan menjadi pilihan yang lebih sulit. Selain itu, mengambil kebijakan yang tidak populis di saat-saat menjelang pemilu adalah suatu hal yang kurang tepat.

Betapa subsidi BBM telah menyedot begitu banyak sumber daya anggaran negara, hal itu bisa dilihat pada grafik yang disajikan di sini. Begitu dilakukannya harga BBM yang



Sumber: Depkeu, diolah

disesuaikan berdasarkan Mid Oil Price Singapore (MOPS) secara mingguan, maka besaran subsidi BBM dapat ditekan ke

ialah untuk penajaman prioritas anggaran. Kenaikan harga BBM pada Oktober 2005 mampu menekan pos subsidi BBM kembali ke angka Rp 60 triliun atau kembali ke level 9% dari total belanja sebagaimana kondisi tahun 2002/2003.

Kondisi ini membuat anggaran negara memperoleh tambahan ruang fiskal untuk membiayai berbagai pengeluaran publik yang lain. Bayangkan kalau saat itu pemerintah tidak berani mengambil langkah yang tidak populis tersebut, sangat mungkin kondisinya akan semakin memusingkan.

Dengan modal itulah pemerintah harus senantiasa konsisten dengan kebijakan yang lebih para upaya menyejahterakan rakyat. Hanya dengan itu pula pemerintah memiliki fleksibilitas memadai untuk menggulirkan program-programnya yang lebih *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*. □

level Rp 30-an triliun atau kurang lebih sebesar 9% dari total belanja tahun 2002 dan 2003.

Setahun sebelumnya, subsidi BBM hampir mencapai Rp 70 triliun rupiah atau setara dengan 20% total belanja. Pencabutan mekanisme penyesuaian harga mingguan mengakibatkan subsidi BBM kembali melonjak ke level Rp 70 triliun rupiah (16%) di tahun 2004 dan mencapai puncaknya pada 2005 saat angka subsidi tidak kurang dari Rp 95 triliun rupiah atau mendekati 20% total belanja APBN. Suatu angka yang belum pernah tercapai untuk dana pendidikan walaupun sudah diamanatkan konstitusi.

### Prioritas Anggaran

Tujuan kedua dari pencabutan sebagian subsidi BBM

► Ekonom pada The Indonesia Economic Intelligence (IEI), kandidat doktor pada School of Economics University of Queensland Australia